

**SKRIPSI**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DESA TERHADAP PERSEPSI  
ANGGARAN PENDAPATAN**

(Studi Kasus Pada Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene)



**MUH. ALI AKSHAN**

**C0216379**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS**  
**KEUANGAN DESA TERHADAP PERSEPSI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN**  
(Studi Kasus Pada Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene)



**MUH. ALI AKSHAN**

**C0216379**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

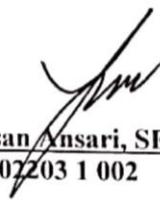
Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**



**Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak**  
**NIP:198404252 01504 2 001**

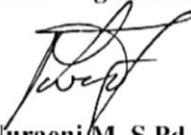
**Pembimbing II**



**Muhammad Ihsan Ansari, SE.,M.Ak.,CGRM**  
**NIP.19900621 202203 1 002**

Menyetujui:

**Koordinator Program Studi Akuntansi**



**Nuraeni/M. S.Pd.,M.Ak**  
**NIP: 19831203 201903 2 006**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DESA TERHADAP PERSEPSI  
ANGGARAN PENDAPATAN**

(Studi Kasus Pada Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene)

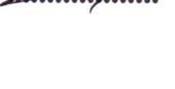
Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUH. ALI AKSHAN**

**C0216379**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian  
Pada Tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1. 
2. Muhammad Ihsan Ansari, SE.,M.Ak.,CGRM	Sekretaris	2. 
3. Jumardi, SE.,M.Si	Anggota	3. 
4. Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak.,CAR	Anggota	4. 
5. Sufyan Amirullah, SE.,M.Ak.,CGRM	Anggota	5. 

Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak**  
NIP.198404252 01504 2 001

  
**Muhammad Ihsan Ansari, SE.,M.Ak.,CGRM**  
NIP.19900621 202203 1 002

**Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Ekonomi**



  
**Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB**  
NIP.19670325199403 2 001

## ABSTRAK

MUH.ALI AKSAN, 2023 **Judul Skripsi Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan**” (Studi Kasus Pada Desa Binanga Kecamatan Binanga Kabupaten Majene). Penelitian ini dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak selaku pembimbing I dan Muhammad Ihsan Ansari, SE.,M.Ak.,CGRM selaku pembimbing II.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) dalam penelitian ini adalah persepsi anggaran pendapatan, sedangkan variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1058 orang yang merupakan penduduk Desa Binangan, sehingga dalam penentuan jumlah sampel digunakan tehnik *slovin*, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 91 orang penduduk Desa Binangan. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Penelitian dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa berpengaruh positif terhadap persepsi anggaran pendapatan dengan nilai signifikan masing- masing 0,011 dan 0,030 ( $<0,05$ ). Secara simultan variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap persepsi anggaran pendapatan dengan nilai signifikansi 0,017( $<0,05$ ).

Kata Kunci :Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Keuangan Desa, Persepsi Anggran Pendapatan

## **ABSTRACT**

MUH.ALI AKSAN, 2023 *Thesis Title The Effect of Community Participation and Village Financial Accountability on the Perception of Revenue Budget*” (Case Study in Binanga Village, Binanga District, Majene Regency). This research was supervised by Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak as supervisor I and Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak., CGRM as supervisor II.

*This research is a type of quantitative descriptive research. Quantitative research can be interpreted as a research method based on the philosophy of positivism, used to examine certain populations or samples, collecting data using research instruments, analyzing data is quantitative/statistical, with the aim of testing established hypotheses. The dependent variable (influenced variable) in this study is the perception of the revenue budget, while the independent variable (influenced variable) in this study is community participation and financial accountability. This research was conducted in Binanga Village, Sendana District, Majene Regency. The population in this study amounted to 1058 people who were residents of Binangan Village, so that in determining the number of samples the slovin technique was used, the number of samples in this study were 91 residents of Binangan Village. The data source in this study is the primary data source obtained from questionnaires which are distributed directly to the respondents. The research was conducted using multiple regression analysis method. The results of this study show that partially the variables of budget participation and village financial accountability have a positive effect on perceptions of budget revenues with significant values of 0.011 and 0.030 (<0.05) respectively. Simultaneously the variables of public participation and financial accountability have a positive effect on perceptions of revenue budgets with a significance value of 0.017 (<0.05).*

*Keywords: Community Participation, Village Financial Accountability, Revenue Budget Perceptions*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata yang berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa merupakan lingkungan yang bergantung pada lokasi tertentu, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk memenuhi keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Desa adalah sekumpulan masyarakat yang secara hukum yang menempati suatu wilayah dan kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan warga setempat melalui insiatif para warga. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. (Aprisiami Putriyanti, 2012).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah strategis. Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. (Nugroho, 2016).

Dana desa diberikan sejak tahun 2015. Jumlah alokasi dana desa mengalami kenaikan setiap tahun dan saat ini nilainya mencapai Rp 1 milyar untuk setiap desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang

pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa didalam Anggaran Pendapatan oleh sebab itu pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dana desa wajib dikelola secara mandiri oleh Kepala Desa dan Aparat Desa. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya dana desa seluruhnya disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes). Keseluruhan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum dan administratif. Prinsip yang digunakan juga harus terarah dan terkendali. Alokasi Dana Desa juga membiayai jenis kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan yang mendasar, kegiatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang telah diputuskan melalui musyawarah desa dan Alokasi Dana Desa juga harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. (Nasihatun, 2015).

Proses demokrasi dalam pemerintahan berbasis pada derajat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menjadi suatu keharusan karena masyarakat merupakan pemilik kedaulatan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Selain itu masyarakat adalah pembayar pajak yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan,

sudah seharusnya masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat dari pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan, keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, dilakukan keterlibatan tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Akan tetapi, ada beberapa masyarakat saat ini yang belum memahami, bahkan belum mengerti mengenai dana desa.

Akuntabilitas keuangan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender kepala desa. Dilakukannya dengan mengukur ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Pernyataan tentang akuntabilitas dana desa oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan korupsi anggaran dana desa disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan dan keuangan desa (ICW, 2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan keuangan desa juga diperlukan agar tujuan alokasi dana desa dapat tercapai dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal pada Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, diketahui adanya beberapa permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana di desa. Selain masalah klasik korupsi, ketidak siapan personal dan pemahaman atas peraturan masih menjadi kendala. Faktor partisipasi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana di desa. Partisipasi dan akuntabilitas ini akan mempunyai kaitan dalam membentuk persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sudah baik walaupun terdapat masalah berupa pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati bersama. Diketahui bahwa persepsi tersebut terbentuk dari keterlibatan masyarakat, keputusan yang sudah memperhatikan pendapat dan kebutuhan warga, pengelolaan keuangan yang transparan, informatif dan terbuka, dan hasil yang dirasakan manfaatnya.

Pengelolaan dana desa ini memang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat alokasi dana desa ini merupakan program baru pemerintah sejak tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi dana desa pada Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Mejene perlu mendapatkan solusi secara tepat. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa berupa APBDes. Persepsi tersebut antara lain dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat desa dalam menyusun APBDes dan akuntabilitas penggunaannya. Penelitian Escobar dan Ross (2014) menunjukkan bahwa

desentralisasi fiskal dapat meningkatkan persepsi dan akuntabilitas. Dana desa yang ditransfer pemerintah pusat ke desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal.

Oleh karena itu dalam setiap pengelolaan alokasi dana desa dan telah diprogramkan, perlu adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pemerintahan desa yang terbuka kepada masyarakat agar bisa terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan dana desa dengan judul penelitian **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan”** (Studi Kasus Pada Desa Binanga Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap persepsi anggaran pendapatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?
2. Apakah pengaruh akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?
3. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap persepsi anggaran pendapatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan terhadap pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan.
2. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan menambah beberapa variabel.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembang literatur-literatur dalam penelitian akuntansi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat yang diperoleh peneliti, mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa di desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

##### **2. Bagi Masyarakat Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritik**

##### **2.1.1 Partisipasi Masyarakat**

###### **2.1.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sujarweni (2015 : 29) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip *good governance*, dimana masyarakat memiliki hak dan peran secara aktif dalam upaya pengambilan keputusan untuk pelaksanaan sistem pemerintahan.

Menurut Zamroni (2011 : 51) partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara di dalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili masyarakat umum.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Pada umumnya disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, dan Baiquni 2013).

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

### **2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi**

Slamet dalam (Theresia, 2014) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. (Theresia, 2014) Dengan demikian masyarakat bergerak untuk berpartisipasi jika:
  - a. partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
  - b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
  - c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
  - d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Partisipasi**

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan

maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## 2. Melemahnya Modal Sosial

Modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal social terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. (Solekhan, 2012)

### **2.1.1.4 Komponen Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sujarweni (2015) partisipasi masyarakat dibagi menjadi tiga komponen yaitu :

1. Pengambilan keputusan dengan indikator, keterlibatan dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa
2. Penyusunan anggaran dengan indikator, memberikan usulan terhadap perencanaan anggaran dana desa dan keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat.
3. Pelaksanaan anggaran dengan indikator, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan anggaran desa, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran desa, dan memberikan penghargaan.

## **2.1.2 Akuntabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Halim (2014 : 83) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban.

Menurut Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas ialah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari pemegang amanah untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan amanah tersebut kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana/bukti bahwa suatu amanah sudah dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik.

### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Mahmudi (2013) mengungkapkan bahwa ada 2 jenis akuntabilitas, yaitu :

#### **1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)**

Akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas Kepala Dinas kepada Bupati atau Walikota, Menteri kepada Presiden, Kepala Unit kepada Kepala Cabang, Kepala Cabang kepada CEO, dan ssebagainya.

## 2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan ataupun bawahan.

### 2.1.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Mahmudi (2013) mengungkapkan bahwa ada beberapa dimensi akuntabilitas, yaitu :

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability For Probity And Legality*)

Merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi.

#### 2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau kostumer-nya.

#### 3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan

program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

#### 5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Berkaitan pertanggungjawaban lembaga – lembaga publik (*money public*) secara ekoomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadiperhatian utama publik.

#### **2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas**

Mahmudi (2013) mengungkapkan bahwa dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas, maka dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas sebagai berikut :

##### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum.

b. Penghindaran korupsi dan kolusi.

## 2. Akuntabilitas Proses

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.

b. Adanya pelayanan publik yang responsif.

c. Adanya pelayanan publik yang cermat.

## 3. Akuntabilitas Program

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.

b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan

a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

b. Mempertimbangkan dampak dimasa depan.

### **2.1.3 Persepsi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Persepsi**

Menurut Zamroni (2015) persepsi adalah proses individu dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam atau luar dirinya.

Menurut Kotler (2013 : 179) persepsi adalah dimana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan dunia yang berarti.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses dalam menggunakan sesuatu yang diterima oleh indra kelima agar setiap individu dapat memilih, mengatur dan menerjemahkan suatu informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

### **2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Menurut Gibson, dkk dalam Rahmatullah (2014 : 11) ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang mencakup beberapa hal yaitu antara lain :
  - a. Fisiologis
  - b. Minat
  - c. Pengalaman dan ingatan
  - d. Suasana hati
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlihat di dalamnya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut :
  - a. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus
  - b. Warna dari objek-objek
  - c. Keunikan dan kontrasan stimulus
  - d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus
  - e. Motion atau gerakan

### **2.1.3.3 Proses Terjadinya Persepsi**

Menurut Kotler dalam Twentinio (2013 :14) seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena adanya proses persepsi yaitu sebagai berikut :

1. Perhatian Selektif
2. Ingatan Selektif

#### **2.1.3.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. (A. Saibani, 2019).

Pelaksana Pengelolaan keuangan desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri sesuai kebutuhan spesifikasi dan potensi yang dimilikinya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggung jawaban

### **2.1.3.5 Pengalokasian Dana Desa**

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.1.3.6 Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota**

Rincian dana desa setiap kabupaten/kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) , dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

(Undang-Undang. 2014)

### **2.1.3.7 Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus)

## 2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empiris adalah penelitian–penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa terhadap persepsi anggaran pendapatan. Beberapa penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Handayani Jaka Saputra dan Suryadi Vol 6 No 01 (2022): Accountia journal Vol. 6 No. 1 Tahun 2022	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Kampung Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKamp) (Studi di Kampung Bukit Makmur, Kabupaten Berau	Perbedaan dalam penelitian ini pada variabel Akuntabilitas dan Belanja (APBKamp) di Kampung Bukit Makmur Kabupaten Berau	Sama-sama meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dan Persepsi Anggaran Pendapatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan di Kampung Bukit Makmur Kabupaten Berau
2.	Siti Umairah dan Adnan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 3,(2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan dalam penelitian ini pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	Sama-sama meneliti tentang Partisipasi Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

		(Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)	Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)		Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)
3.	Andreani Avellyni Leda Making dan Handayani Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol. 10, No. 10, (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Perbedaan dalam penelitian ini pada variabel Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif Terhadap Pengelolaan Dana Desa
4.	Yassir, Mursalim dan Asriani Junaid YUME : Journal of Manajemen (2022)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah Enrekang)	Perbedaan dalam penelitian ini pada variabel Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah)	Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah)
5.	I Gede Made Artha Dhamakarja , I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma dan Chandra Maulana Putra Jurnal Manajemen	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Perbedaan dalam penelitian ini pada variabel Belanja Desa	Sama-sama meneliti tentang Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa berpengaruh secara simultan Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan

	Keuangan Publik Vol.4, No. 2, (2020)				
--	---	--	--	--	--

### 2.3 Hubungan Antar Variabel

#### 1. Partisipasi Masyarakat terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan

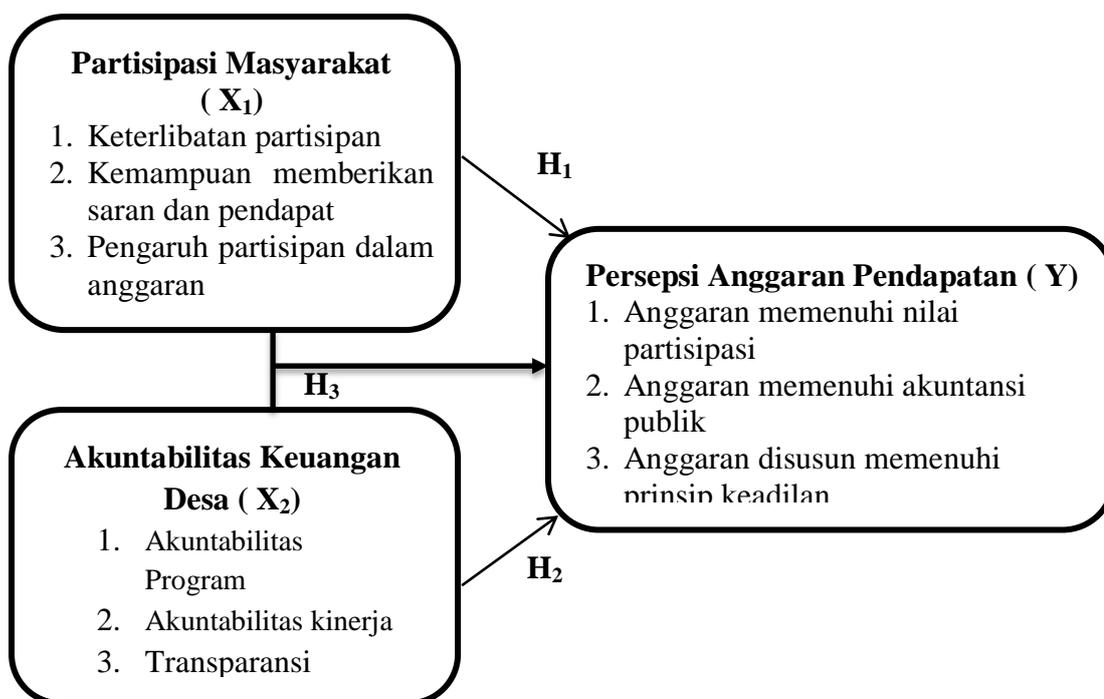
Dalam menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang optimal adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program yang direncanakan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Hasil dari penelitian terkait partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menemukan bahwa partisipasi masyarakat mampu menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan apabila masyarakat tidak dilibatkan maka pengelolaan keuangan desa menjadi kurang transparan dan akuntabel. Berdasarkan penelitian dari (Ika Wulandari, 2020) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap persepsi anggaran pendapatan.

#### 2. Akuntabilitas Keuangan Desa terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan

Desa sebagai bagian suatu Negara wajib melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya yang dilakukan oleh aparat desa yaitu melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini wajib memperhatikan *good governance* sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip *good governance* ini meliputi prinsip transparansi dan akuntabel.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan tinjauan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut ini digambarkan kerangka konseptual pengaruh antar variabel penelitian dan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini hendak mencari pengaruh antara variabel *independen* (bebas) dengan variabel *dependen* (terikat), dimana yang menjadi variabel *independen* (bebas) adalah partisipasi masyarakat(X1) dan akuntabilitas keuangan desa(X2) yang menjadi variabel dependen(terikat) adalah persepsi anggaran pendapatan(Y). Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan yang tersaji pada 2.1 berikut ini.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

—————> Pengaruh Secara Parsial

—————> Pengaruh Secara Simultan

## 2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam kalimat pertanyaan ataupun pernyataan. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini :

H1 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan

H2 : Akuntabilitas Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan

H3 : Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

Secara parsial partisipasi masyarakat (X1) berpengaruh signifikan terhadap persepsi anggaran pendapatan (Y). Secara parsial akuntabilitas keuangan desa (X2) berpengaruh signifikan terhadap persepsi anggaran pendapatan (Y). Secara simultan partisipasi masyarakat (X1) dan akuntabilitas keuangan desa (X2) berpengaruh signifikan terhadap persepsi anggaran pendapatan (Y) pada Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode pengambilan data yang lain berupa wawancara untuk lebih mengetahui secara detail terkait partisipasi masyarakat serta tingkat akuntabilitas pengelolaan dana pada pemerintah desa.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel yang bisa berpengaruh terhadap persepsi anggaran seperti kualitas Sumber Daya Manusia perangkat desa, serta teknologi informasi yang digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprisiami Putriyanti. (2012). *Penerapan Otonomi Desa Dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Updet PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani Jaka Saputra dan Suryadi. 2022. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Kampung Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja APBKamp Studi di Kampung Bukit Makmur, Kabupaten Berau*.
- Ibrahim, I., Rejeki, S., & Sawaludin, S. (2017). Persepsi masyarakat Desa Bujur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terhadap UndangUndang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- ICW, I. C. W. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik.
- Indonesia, Pemerintah Republik (2014). *UndangUndang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa*
- Karyanto, R. (2016). Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa?.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta; Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN* Pasal 11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

- Siti Umairah dan Adnan. 2019. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Yogyakarta : ALFABETA
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Yassir, Mursalim dan Asriani Junaid. 2022. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Daerah Enrekang*.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.